

STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENDAMPING PEMBANGUNAN PERTANIAN

Strategy to Improve Social Capital Capacity and Human Resource Quality as Facilitator in Agricultural Development

Sjafri Mangkuprawira

*Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga, Bogor 16880*

ABSTRACT

Based on the Human Development Index (HDI) figures, the Indonesian welfare level show that the community development process must be continuously carried out. The most important elements in the successful achievement of community development especially in rural community to support agricultural development are natural capital, technology, institutional, human capital, and social capital. The elements of social capital in this respect are mutual trustworthy on fellow members of the community, social empathy, social cohesion, social awareness, and collective cooperation. This paper examines the significance of social capital in agricultural development, as well as how the strategy to strengthening co-utilization and community development. Through a review of some study results on the role of facilitator in community development, strengthening social capital is required in the development community, particularly through the assistantship or mentoring process. Facilitators especially extension workers are needed in community development because of their function as problem analyst, group supervisor, trainer, innovator, and liaison officer. The principles of operation are (1) working group, (2) continuity, (3) self-reliance, (4) unity of target audiences, (5) growth of mutual trust, and (6) continuous learning process. In addition, the assistantship program is highly considered as an activity enabling the optimum empowerment of the poor. For an optimum role of technical assistant, the development of quality human resources is required through participatory training-based education and development of assistantship forum.

Key words : *community welfare, community development, social capital, facilitator of community development*

ABSTRAK

Derajat kesejahteraan rakyat Indonesia dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia membuktikan bahwa proses pengembangan masyarakat harus tetap dilaksanakan secara terarah dan bersinambung. Unsur terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat khususnya di wilayah perdesaaan untuk mendukung pembangunan pertanian adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial. Unsur modal sosial yang dimaksud diantaranya adalah saling percaya pada sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerja sama kolektif. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji arti penting modal sosial dalam pembangunan pertanian, serta bagaimana strategi pemanfaatan dan penguatan pendamping (khususnya penyuluh pertanian) dalam pengembangan masyarakat. Melalui review dari beberapa hasil kajian terhadap peran pendamping dalam pengembangan masyarakat, penguatan modal sosial sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat, khususnya melalui proses pendampingan. Penyuluh pertanian sangat dibutuhkan dalam pengembangan masyarakat karena mempunyai fungsi sebagai analis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Prinsip kerja pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian melalui pendampingan adalah: (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) pembelajaran bersinambung. Disamping itu, pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat miskin secara optimal. Agar pendamping dapat berperan optimum maka dibutuhkan pengembangan mutu sumber daya manusianya melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa dan pengembangan forum pendampingan.

Kata kunci: *kesejahteraan masyarakat, pengembangan masyarakat, modal sosial, mutu pendamping*

PENDAHULUAN

Pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian di Indonesia baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah sudah lama berlangsung. Bentuknya berupa pengembangan sumber daya manusia atau SDM (pendidikan dan kesehatan), peningkatan pendapatan, infrastruktur, maupun pengembangan organisasi-organisasi sosial ekonomi. Pelaku pembangunan pertanian di Indonesia sebagian besar berada di wilayah perdesaan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dengan demikian, fokus pengembangan masyarakat pertanian juga perlu difokuskan untuk masyarakat perdesaan.

Pendekatan pengembangan masyarakat perdesaan mendukung pembangunan pertanian yang telah dilakukan sangat bervariasi, yaitu yang parsial maupun terintegrasi dari beragam pendekatan seperti pengintegrasian pendekatan lokalita, perencanaan sosial dan pendekatan wilayah ekonomi, serta pembangunan lokalita dan perencanaan aksi. Strategi pendekatan pengembangan masyarakat akan beragam bergantung pada kondisi daerahnya dan sesuai dengan asumsi-asumsi yang digunakan.

Pada dasarnya, tujuan pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani khususnya dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat perdesaan untuk pengembangan sektor pertanian tidak pernah mengenal kata berhenti. Proses pengembangan masyarakat perdesaan akan berjalan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan salah satu ciri dari masyarakat, yaitu dinamis. Hal ini dicirikan antara lain oleh kebutuhan masyarakat perdesaan yang senantiasa berubah ke arah kehidupan yang semakin lebih bermutu. Perkembangan kebutuhan masyarakat perdesaan sangat ditentukan oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik individu, serta kelompok masyarakat itu sendiri. Unsur intrinsik meliputi tingkat pendidikan dan wawasan individu yang semakin meningkat. Sementara itu, unsur ekstrinsik dapat berupa kebijakan pembangunan, akses pembangunan, dan turbulensi sosial ekonomi dan politik.

Unsur intrinsik dan ekstrinsik akan mempengaruhi setiap kegiatan pengembangan masyarakat.

Pelaksanaan program dan keberhasilan pengembangan masyarakat sangat ditentukan pula oleh derajat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di suatu wilayah. Dalam prakteknya, pendekatan akan berbeda sesuai dengan spesifik daerah seperti daerah pesisir, pegunungan, daerah sekitar hutan, daerah perdesaan, dan daerah perkotaan. Selain itu nilai-nilai masyarakat berupa modal sosial positif berupa jejaring sosial, kepercayaan, timbal balik, dan kebersamaan diduga juga berpengaruh kuat terhadap keberhasilan pengembangan masyarakat. Sebaliknya nilai-nilai primordial, nepotisme, sindikat mafia pengadilan, makelar kasus (markus), sebagai modal sosial negatif diduga akan merugikan masyarakat. Kerusakan sosial di sebagian kecil daerah diduga karena kuatnya modal sosial negatif, maka biaya sosialnya ditanggung oleh masyarakat.

Dalam upaya pengembangan masyarakat perdesaan, perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan dalam proses pengembangan masyarakat yang mengarah pada proses pemberdayaan dalam pembangunan pertanian adalah pendampingan. Menurut Sumodiningrat (2009), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan masyarakat pertanian di perdesaan yang miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Masyarakat memiliki sifat multidimensi. Masing-masing dimensi saling berkait dan saling bergantung dalam suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang total, berupa kekayaan sosial (modal sosial dan manusia). Sejalan dengan perubahan dinamika sosial, maka pendekatan pengembangan masyarakat

bersifat multidimensi. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Apa saja arti penting modal sosial dalam pembangunan pertanian dan bagaimana penguatannya? Bagaimana mutu pendamping yang diperlukan untuk merevitalisasi modal sosial positif, sehingga tujuan pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian dapat berhasil? Selanjutnya bagaimana strategi pemanfaatan pendamping dalam pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan?

Tulisan ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap beberapa hasil proses pengembangan masyarakat melalui pendampingan sehingga dapat memberikan rekomendasi strategi pemanfaatan pendamping dalam proses pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan. Secara khusus, tujuan tulisan ini adalah (1) memberikan gambaran terhadap kondisi sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini; (2) menganalisis arti penting modal sosial dalam pembangunan dan mekanisme penguatan modal sosial; (3) mendeskripsikan kualitas/mutu pendamping yang diperlukan untuk merevitalisasi modal sosial positif, sehingga tujuan pengembangan masyarakat dapat berhasil mendukung pembangunan bidang pertanian; (4) merumuskan usulan strategi pemanfaatan pendamping dalam pengembangan masyarakat mendukung pembangunan pertanian.

KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dari negara-negara yang diteliti oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2008 masih berada pada urutan di atas 100. Sebelumnya pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 110 dari 177 negara, dengan indeks 0,697, turun dari posisi sebelumnya di urutan 102 dengan indeks 0,677 pada tahun 1999 (Tabel 1). Posisi ini cukup jauh dibandingkan negara-negara tetangganya, seperti Filipina (urutan 84/0,758) dan Vietnam (urutan 108/0,704).

Angka IPM Indonesia pada tahun 2006 mengalami kemajuan, yaitu dengan mencapai 0,711 dan berada di urutan 108, mengalahkan Vietnam yang mempunyai nilai 0,709. Kecenderungan dari angka IPM Indonesia adalah terus menerus naik dari tahun ke tahun sampai tahun 2006 (0,677 pada 1999, 0,697 pada 2005, dan 0,711 pada tahun 2006). Hal ini menjadikan Indonesia semakin mempersempit ketertinggalannya dibandingkan dengan negara-negara lain. Posisi ini sekaligus memposisikan Indonesia berada pada level menengah IPM di dunia bersama negara tetangga seperti Filipina (84) dan Vietnam (109). Capaian tersebut berbeda dengan tetangga yang lain seperti Singapura (25), Brunei (34) dan Malaysia (61), yang masuk pada kategori negara dengan IPM level

Tabel 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Tahun 2005 – 2008

Uraian	2008		2007-2008		2006		2005	
	Peringkat/ ranking	Skor	Peringkat/ ranking	Skor	Peringkat/ ranking	Skor	Peringkat/ ranking	Skor
Norwegia	2	0,968	2	0,968	1	0,965	1	0,963
Filipina	102	0,745	90	0,771	84	0,763	84	0,758
Indonesia	109	0,726	107	0,728	108	0,711	110	0,697
Vietnam	114	0,718	105	0,733	109	0,709	108	0,704
Sierra Leone	179	0,329	177	0,336	176	0,335	176	0,298
Total negara	179	-	177	-	177	-	177	-

Sumber: UNDP (2009)

tinggi. Negara-negara dengan capaian IPM tinggi mempunyai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan yang sedang maupun rendah.

Pada tahun 2007 angka IPM Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0,728. Laporan ini dikeluarkan oleh UNDP pada 27 November 2007 (UNDP 2007), sehingga Indonesia berada pada peringkat 108 sedunia namun masih di bawah Vietnam. Selanjutnya pada tahun 2008 Indonesia berhasil melampaui Vietnam dengan nilai IPM sebesar 0,726 sementara Vietnam sebesar 0,718. Meskipun angka IPM Indonesia mengalami peningkatan, namun ternyata peringkat Indonesia menurun dari tahun 2007, yaitu pada peringkat 109. Penilaian IPM di antaranya didasarkan atas usia harapan hidup yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-100; tingkat pemahaman aksara dewasa di urutan 56; tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi di urutan 110; dan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita yang berada di posisi 113. Bagaimana dengan kondisi pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan masyarakat?

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) (BPS 2008) yang dilakukan pada bulan Februari 2008 (Tabel 2), jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai sekitar 9 juta orang atau sekitar 8 persen dari keseluruhan jumlah angkatan kerja. Dari jumlah pengangguran sekitar 9 juta tersebut, pengangguran pria mencapai sekitar 5 juta orang, sementara pengangguran wanita sebanyak 4 juta orang. Jumlah penduduk Indonesia sendiri sampai saat ini tercatat sebanyak 228 juta orang, dengan jumlah angkatan kerja 112 juta orang. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, 62 persen di antara-

nya adalah kaum pria dan 38 persen kaum wanita.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, jumlah pengangguran dilihat dari segi pendidikan didominasi oleh yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD, lulusan SD, dan SMP yang mencapai sekitar 50 persen. Selebihnya sebanyak 23,04 persen memiliki pendidikan setara dengan SMP dan 14,45 persen berpendidikan SLTA, serta sekitar 12 persen di antaranya adalah mereka yang telah menamatkan pendidikannya setara dengan Diploma dan bahkan sarjana (BPS 2009).

Sementara itu hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2008, jumlah orang miskin mencapai 34,96 juta atau 15 persen dari total penduduk Indonesia, atau turun 2,21 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2007 yang tercatat ada 37,17 juta warga miskin di Tanah Air. Dari data BPS, pada Maret 2007, sebanyak 63,52 persen penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan. Bagaimana dengan tingkat pendidikannya?

Warga buta aksara mencapai 18,1 juta orang dan 4,35 juta di antaranya tergolong usia produktif (15-44 tahun). Di atas 44 tahun terdapat 13,4 juta orang dan tragisnya dari semua yang buta aksara tersebut sebanyak 70 persen adalah perempuan (BPS & Depdiknas 2007). Menurut hasil Studi *Political and Economical Risk Consultancy* (PERC) tahun 2005, mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Derajat pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, atau posisi paling buncit. Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, berada di atas Indonesia. Tujuh belas indikator yang digunakan oleh PERC terdiri atas impresi dari keseluruhan tentang

Tabel 2. Jumlah Pengangguran Terbuka di Indonesia Berdasarkan Sakernas (Februari 2009)

Status pendidikan	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Persentase (%)
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Belum Tamat SD	2.620.049	28,30
Sekolah Dasar	2.054.682	22,19
SLTP	2.133.627	23,04
SMTA	1.337.586	14,45
Diploma I/II/III/Akademi	486.399	5,25
Universitas	626.621	6,77
Total	9.258.964	100,00

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009 (BPS 2010).

sistem pendidikan di suatu negara; proporsi penduduk yang memiliki pendidikan dasar; proporsi penduduk yang memiliki pendidikan menengah; proporsi penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi; jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja produktif; ketersediaan tenaga kerja produktif berkualitas tinggi; jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja; ketersediaan staf manajemen; tingkat keterampilan tenaga kerja; semangat kerja (work ethic) tenaga kerja; kemampuan berbahasa Inggris; kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris; kemampuan penggunaan teknologi tinggi; tingkat keaktifan tenaga kerja; frekuensi perpindahan atau pergantian tenaga kerja (labor turnover).

Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah membuktikan bahwa pengembangan masyarakat harus berjalan bersinambung. Alasan lainnya adalah perkembangan dinamika sosial masyarakat tidak pernah berhenti. Mutu SDM terus berubah dalam hal yang sama tentang sistem nilai-nilai sosial lokal, sehingga dapat berubah sejalan dengan perubahan eksternal. Misalnya adalah dengan semakin mutakhirnya teknologi komunikasi, teknologi produksi, infrastruktur, dan perdagangan global akan berimbas pada tataran sistem sosial yang ada.

PENTINGNYA MODAL SOSIAL BAGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Modal Sosial dan Pengembangan Masyarakat Perdesaan

Modal sosial merupakan konsep sosiologi yang digunakan dalam beragam ilmu seperti bisnis, ekonomika, perilaku organisasi, politik, kesehatan masyarakat dan ilmu-ilmu sosial. Semua itu untuk menggambarkan adanya hubungan di dalam dan antarjaringan sosial (wikipedia) yang memiliki nilai. Seperti halnya modal fisik atau modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan kelompok, maka modal sosial berlaku serupa. Bourdieu (1986) membedakan tiga bentuk modal yaitu modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Modal sosial didefinisikan sebagai *"the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or*

less institutionalised relationships of mutual acquaintance and recognition".

Sementara itu Coleman (1988) berpendapat bahwa modal sosial secara fungsi adalah sebagai *"a variety of entities with two elements in common: they all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of actors...within the structure"*. Dia mengatakan bahwa modal sosial memfasilitasi kegiatan individu dan kelompok yang dikembangkan oleh jaringan hubungan, timbal balik, kepercayaan dan norma sosial. Modal sosial, menurut pandangannya, merupakan sumber daya yang netral yang memfasilitasi setiap kegiatan dimana masyarakat bisa menjadi lebih baik dan bergantung pada pemanfaatan modal sosial oleh setiap individu.

Pengertian dan unsur modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam *et al.* (1993) adalah *"Features of social organization, such as trust, norms (orreciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated"*. Selanjutnya Putnam (2006), modal sosial juga sebagai *"the collective value of all 'social networks' and the inclinations that arise from these networks to do things for each other"*. Dia percaya modal sosial dapat diukur dari besarnya kepercayaan dan timbal balik dalam suatu masyarakat atau di antara individu-individu. Selain itu, konsep modal sosial memiliki pendekatan yang lebih besar pada unsur individual. Investasi dalam hubungan sosial dikaitkan dengan harapan diperolehnya profit dari pasar.

Bagaimana hubungan modal sosial dengan pembangunan atau pengembangan masyarakat? Fukuyama (1996) mengatakan modal sosial adalah sebagai prakondisi untuk keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini undang-undang dan pranata politik menjadi hal pokok dalam membangun modal sosial, karena menjadi syarat pokok dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan politik yang kuat. Fukuyama mengupas pentingnya modal sosial berbasis pada kepercayaan, yaitu masyarakat dalam keseharian berinteraksi dengan modal sosial yang kuat yang ditunjukkan dengan suasana saling percaya antarwarga. Bentuk modal inilah yang memiliki hubungan erat dengan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat atau bangsa.

Ada empat nilai yang sangat erat kaitannya dengan definisi yang dikemukakan oleh Fukuyama yaitu *universalism* nilai tentang pemahaman terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya; *benevolence* nilai tentang nilai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain; *tradition* nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional; *conformity* nilai yang terkait dengan pengekangan diri terhadap dorongan dan tindakan yang merugikan orang lain, serta *security* nilai yang mengandung keselamatan, keharmonisan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri sendiri. Modal sosial pada dasarnya bersumber dari rasa percaya (*trust*) pada setiap pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.

Pendapat yang agak mirip dengan Fukuyama tentang definisi dan manfaat modal sosial adalah menurut Barbier (1990), Faucheux & O'Connor (1998), dan Ancok (2007) yaitu modal sosial berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi karena: (a) arus informasi akan lebih cepat bergerak antar agen ekonomi jika modal sosial cukup baik, (b) kepercayaan sebagai komponen utama modal sosial positif akan mengurangi biaya pencarian informasi, sehingga mengurangi biaya transaksi, (c) modal sosial positif akan mengurangi kontrol pemerintah, sehingga pertukaran ekonomi lebih efisien.

Selanjutnya dinyatakan bahwa modal sosial dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *natural capital* dengan cara: (a) mengurangi eksternalitas negatif, karena dengan adanya modal sosial setiap agen ekonomi harus berpikir dalam melakukan aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pihak lain, (b) mengurangi tingkat *discount rate* yang tinggi, karena *social capital* yang baik akan memungkinkan pembagian risiko sehingga ketidakamanan individu (*individu insecurity*) dapat dikurangi, dan (c) memperkecil kemungkinan resiko yang ditimbulkan oleh sifat *common property* sumber daya alam (SDA) karena modal sosial yang kuat akan mengurangi runtuhnya sistem pengelolaan SDA yang buruk.

Modal sosial dianggap dapat digunakan pula untuk meningkatkan kinerja organi-

sasi agar suatu organisasi dapat memberikan beberapa peluang yang tidak terencana (Akdere and Paul 2008). Dalam pengembangan masyarakat, peran modal sosial sangat penting, karena di dalamnya menyangkut transformasi sosial. Transformasi sosial disini terkait dengan pola pikir dan sikap hidup. Pada awal pembentukan pengembangan masyarakat transformasi ide dan gagasan dari pendamping merupakan hal yang wajib dilakukan agar program dapat dilakukan dengan keyakinan yang tinggi. Dengan demikian ide yang dimaksud dapat terlaksana dengan baik. Pengembangan masyarakat dapat memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pengembangan masyarakat dapat dikatakan pula sebagai upaya pembangunan sosial.

Selain mentransformasi ide, dalam komunitas tersebut program pengembangan masyarakat harus dapat mengubah sistem nilai dan perilaku dari khalayak sasaran. Perubahan sistem nilai dan perilaku inipun erat kaitannya dengan konsep modal sosial yang dikemukakan di atas. Dengan adanya modal sosial, maka program pengembangan masyarakat akan dapat memperkenalkan sistem nilai dan perilaku yang bersifat positif di masyarakat lewat kontrak sosial. Dalam praktiknya pengembangan masyarakat melibatkan peran individu di dalam masyarakat. Individu yang mempunyai sifat kepribadian terkait erat dengan modal sosial merupakan komponen dari *community development* (CD) yang cukup efektif nantinya. *Community Development* sebagai suatu upaya pembangunan sosial dapat dilihat dari indikator keluaran, seperti tingkat kemiskinan, melek huruf, tingkat harapan hidup, dan partisipasi sosial. Indikator yang sering disebut dengan indikator sosial ini telah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Misalnya, *Social Accounting Matrix* (SAM) yang digagas oleh Pyatt dan Round (1977); *Physical Quality of Life Index* (PQLI) oleh Morris (1977), dan *Human Development Index* oleh tim UNDP (Mahbub UI Haq, Amartya Sen, Paul Streeten *et al*). Pembangunan sosial dapat pula diukur dari indikator masukan yang umumnya dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Menurut Haq (1995), idealnya negara berkembang dan maju dapat mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sosial antara 15 – 20 persen

dari pengeluaran pemerintahnya. Modal sosial dapat mendorong pada pemerintahan yang baik dan kemajuan ekonomi.

Bagaimana modal sosial mendasari pemerintahan yang baik dan kemajuan ekonomi? Jaringan keterlibatan sipil norma-norma yang kokoh akan memberikan perangkat timbal balik umum. Sebuah masyarakat yang bergantung pada timbal-balik umum lebih efisien daripada masyarakat yang tidak percaya, karena alasan yang sama bahwa uang lebih efisien daripada barter. *Trust* memberikan pelumas dalam kehidupan sosial. Jaringan keterlibatan masyarakat sipil juga memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan memperkuat informasi tentang kepercayaan orang lain. Akhirnya, jaringan keterlibatan sipil dapat mewujudkan kesuksesan di masa lalu untuk dikolaborasi sehingga dapat digunakan sebagai *template* untuk kolaborasi budaya masa depan (Putnam, 1993).

Di tingkat dunia, modal sosial pun menjadi isu penting karena menjadi satu konsep strategis tentang persoalan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, modal sosial terdapat di berbagai daerah. Sistem kekerabatan antar individu dan kelompok, tolong menolong secara timbal balik, empati sosial, gotong royong, penghimpunan dana bencana, saling percaya antarindividu, kebersamaan, dan kohesi sosial merupakan contoh-contoh modal sosial yang ada di Indonesia.

Keberagaman agama yang sangat lekat di Indonesia juga merupakan modal sosial yang memiliki energi positif yang besar. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Barker (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "*Investments in Religious Capital: An explorative case study of Australian Buddhists*" bahwa konsep modal agama saat ini sedang digunakan untuk memahami efek dari beberapa praktik keagamaan, dan dikembangkan lebih lanjut sebagai cara untuk memahami dampak sosial yang lebih luas dari agama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Finke (2003) bahwa kegiatan keagamaan seperti doa, ritual, mukjizat, dan pengalaman mistik, yang dilakukan dan dialami seumur hidup, tidak hanya meningkatkan keyakinan dalam kebenaran agama, tetapi juga memperkuat ikatan emosional dengan agama tertentu. Dengan demikian, kekuatan emosi dan penguasaan agama menjadi investasi yang

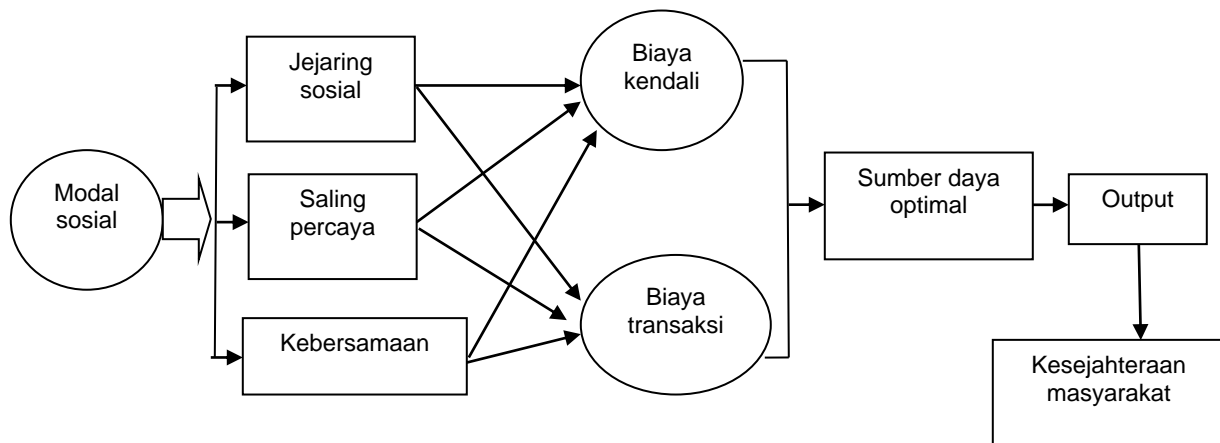
membangun dari waktu ke waktu dan merupakan modal keagamaan. Modal ini membantu untuk menjelaskan kegiatan keagamaan dan kepuasan individu (Finke 2003). Disamping modal sosial positif, di dalam masyarakat ada yang dikenal modal sosial negatif seperti primordialisme, individualisme sempit, nepotisme dan mafia tindakan ilegal yang dapat menimbulkan eksternalitas negatif merugikan masyarakat.

Ciri terjadinya proses pengembangan masyarakat adalah terjadinya pertumbuhan, atau perkembangan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tanpa terjadinya eksternalitas negatif. Sebagai modal sosial yang memperkuat pengembangan masyarakat adalah adanya perekat integritas kelompok manusia yang terikat pada interaksi sosial yang menimbulkan rasa kebersamaan dan kepentingan bersama, saling menghormati hak dan tanggungjawab. Selain itu ada ketaatan dalam satu identitas tertentu, taat pada norma-norma kebersamaan, menghormati hak dan tanggungjawab.

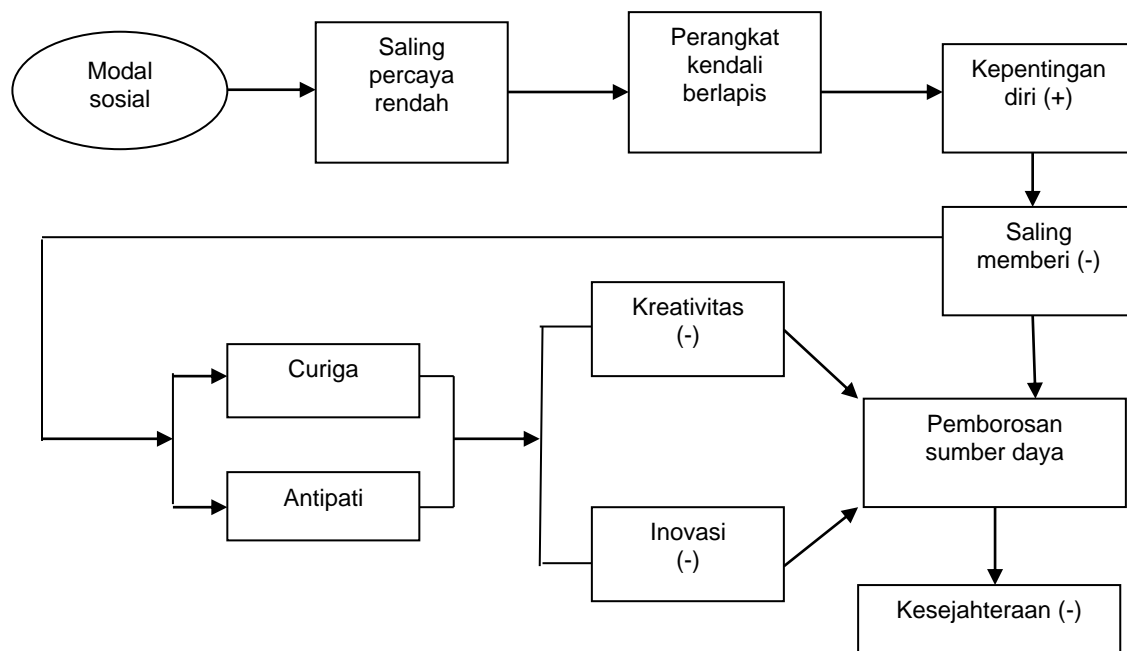
Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat merupakan salah satu model pendekatan pembangunan dengan upaya melibatkan peran aktif masyarakat beserta sumber daya lokal yang ada. Selain itu, dalam pengembangan masyarakat hendaknya diperhatikan sisi kearifan lokal, dimana masyarakat memiliki tradisi dan adat-istiadat sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai modal sosial. Gambar 1 dan 2 berikut ini secara hipotetis menunjukkan hubungan modal positif dan negatif dengan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1 menunjukkan bahwa modal sosial yang positif memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai oleh jejaring sosial yang luas, tingginya saling percaya sesama anggota masyarakat dan jiwa kebersamaan yang tinggi. Modal sosial ini akan memperkecil biaya transaksi dan biaya kendali untuk suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Dengan kata lain, mampu menciptakan pengelolaan sumber daya optimum dan kemudian menghasilkan *output* yang semakin besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2 memperlihatkan bahwa modal sosial negatif menurunkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurang-



Gambar 1. Hubungan Modal Sosial Positif dengan Kesejahteraan Masyarakat



Gambar 2. Hubungan Modal Sosial Negatif dengan Kesejahteraan Masyarakat

nya rasa saling percaya sesama warga yang menyebabkan perangkat kendali semakin berlapis karena meningkatnya perilaku kepentingan diri dan menurunnya sifat saling memberi. Timbulnya rasa saling curiga dan antipati menyebabkan masyarakat mengalami stagnasi yang dicirikan oleh rendahnya kreativitas dan inovasi yang ditemukan. Dalam situasi seperti itu, berarti terjadi pemborosan sumber daya dan pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Modal Sosial Bagi Pembangunan Pertanian

Modal sosial positif adalah syarat utama bagi keberhasilan pengembangan masyarakat. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkat pula volume dan mutu proses, serta hasil pengembangan masyarakat. Ukuran *output*nya adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam hal ini, modal sosial

sangat berperan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu tidak lepas dari adanya kepercayaan sebagai modal utama seperti membangun sifat-sifat atau nilai-nilai kohesi sosial, kebersamaan, toleransi, dan empati. Fungsi-fungsi kontrol dalam pengembangan masyarakat relatif longgar karena adanya saling percaya sesama individu.

Dalam kenyataannya modal sosial tidaklah statis sehingga tidak terhindar pula dari dampak perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang cenderung dapat menimbulkan deviasi modal sosial. Hal ini menimbulkan adanya perkembangan persepsi di tiap individu terhadap hal-hal baru apakah sebagai ancaman atau justru memperkuat modal sosial yang ada. Selain itu ketika masyarakat sudah semakin memiliki hubungan dengan pihak luar maka dibutuhkan fungsi kendali sosial terhadap setiap norma dan kebudayaan luar yang masuk. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh entitas sosial dan bagaimana melakukannya agar dapat membentengi tantangan dan ancaman dari luar.

Melemahnya modal sosial positif disebabkan oleh adanya intervensi modal sosial negatif. Kalau masyarakat tidak mampu mengatasinya, maka akan terjadi penggerusan modal sosial positif yang ada; misalnya gangguan terhadap interaksi sosial, saling percaya yang menurun, pelanggaran norma sosial, krisis kepemimpinan dan akhirnya kerenggangan hubungan sosial. Meningkatnya semangat nilai-nilai budaya konsumerisme dan individualistik, akan dengan mudah menimbulkan konflik dan perilaku menyimpang. Perilaku yang tidak jarang ditemukan, misalnya primordialisme dan sentimen kedaerahan atau kesukuan dapat menimbulkan kerusuhan sosial. Begitu pula yang terkait dengan sindikat dan mafia kegiatan ilegal dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Hal itu semakin parah karena lemahnya fungsi kontrol sosial dan intensitas komunikasi yang rendah. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus, akan menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan terhadap institusi sosial lokal.

Untuk memperkuat modal sosial positif dan memperkecil terjadinya modal sosial

negatif sehingga dapat mendukung proses pembangunan pertanian, beberapa pendekatan yang dapat dikembangkan adalah:

- a. Pendidikan agama sebagai sumber pengembangan nilai-nilai luhur untuk membangun sifat kebersamaan dan saling percaya sesama manusia, termasuk meningkatkan kesadaran lingkungan lestari. Dalam hal ini, pendekatannya tidak sebatas pada perkembangan kognitif, namun seharusnya pada pengembangan sikap atau afeksi.
- b. Pendidikan sosialisasi keluarga. Sebagai sistem sosial terkecil seharusnya keluarga menjadi basis utama dalam menanamkan nilai moral kehidupan, dimana peran kepala keluarga menjadi sangat sentral dalam memberi teladan untuk berperilaku yang baik.
- c. Pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial. Proses pembelajaran keahlian untuk bekerja sama, norma hubungan timbal balik dan tindakan kolektif perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Selain itu institusi diharapkan mampu mengembangkan solidaritas sosial dalam menghadapi situasi apapun.
- d. Upaya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang ada dalam modal sosial khususnya yang menyangkut pendidikan karakter perlu ditingkatkan mulai dari kalangan generasi dini, baik lewat pendidikan formal maupun informal seperti pelatihan kerja sama tim.
- e. Pengembangan komunikasi informasi lewat beragam media dan saluran seni budaya diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai luhur dari kearifan lokal, kerja sama, saling percaya, dan tanggung jawab.
- f. Nilai-nilai dari luar tidak harus dihambat untuk masuk sejauh memiliki hal-hal yang dianggap positif dan bahkan memperkuat modal sosial yang sudah ada dengan ketentuan dilakukan penyaringan secara selektif oleh institusi sosial dan khalayak luas.

MUTU PENDAMPING DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERDESAAN

Pendekatan Konseptual Mutu Pendamping

Pendampingan oleh seseorang dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat pertanian di perdesaan merupakan program yang telah biasa dilaksanakan. Dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pertanian di perdesaan, pendamping harus memiliki mutu SDM yang tinggi baik dari kapasitasnya dalam penguasaan teknik produksi dan pemasaran maupun dalam penguasaan *soft skill*. Karena yang didampingi adalah masyarakat pertanian di perdesaan dengan kondisi sosial ekonomi maupun sumber daya lingkungan yang terbatas, maka pendamping harus memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi kepada masyarakat yang didampingi. Tidak mungkin tanpa menggunakan modal manusia bermutu, proses pembangunan pertanian akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula diperlukan modal sosial untuk mempercepat proses dan mutu hasil pengembangan masyarakat di bidang pembangunan pertanian yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Kedua sumber daya tersebut memiliki keunikan masing-masing. Perbedaan kedua faktor tersebut dapat dilihat dari sisi fokus, ukuran, *outcome*, dan model yang disajikan pada Tabel 3.

Fokus modal (sumber daya) manusia dalam pengembangan masyarakat perdesaan terletak pada potensi perorangan di suatu masyarakat; misalnya dalam hal mutu SDM pelaku pembangunan pertanian dari hulu ke

hilir. Sementara sebagai modal sosial masyarakat perdesaan, fokusnya terletak pada hubungannya dengan jejaring sosial yang dibentuk khalayak, yaitu saling percaya di antara individu. Hal ini menjadi modal dalam membangun kerja sama dan solidaritas.

Pengukuran modal manusia jauh lebih mudah dibandingkan dengan pengukuran modal sosial. Ukuran dari modal manusia dapat dilihat dari lamanya sekolah dan kualifikasinya, termasuk dapat diukur kinerjanya yang merupakan fungsi dari mutu SDM. Sementara ukuran modal sosial dilihat dari gambaran abstrak tentang sikap (nilai), partisipasi dan kepercayaan, serta sering dilihat dari gambaran sejauh mana modal sosial, misalnya kekuatan jejaring sosial ekonomi mampu mengembangkan program pengembangan masyarakat perdesaan.

Output dari pengembangan masyarakat ditinjau dari modal manusia adalah pendapatan dan produktivitas; tidak langsung berupa kesehatan dan kegiatan sosial. Namun modal sosial pun bisa berdampak pada ekonomi. Misalnya kohesi sosial akan mampu memperkuat jejaring sosial sehingga dapat memperlancar usaha-usaha ekonomi bisnis. Begitu pula pelatihan dapat berpengaruh terhadap produktivitas kerja, namun dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam membangun jejaring sosial.

Modal manusia sangat terkait dengan keberhasilan investasi karena pengaruhnya dapat dilihat secara langsung dalam meningkatkan pendapatan bisnis. Sementara modal sosial tidak mudah melihat dampaknya terhadap pengembangan masyarakat. Namun demikian, yang lebih menonjol adalah terjadi-

Tabel 3. Kerangka Kerja antara Modal Manusia dan Modal Sosial

	Modal manusia	Modal sosial
Fokus	Perorangan (individual agent)	Hubungan (relationship)
Pengukuran	Lamanya sekolah Kualifikasi	Sikap/nilai-nilai Keanggotaan/partisipasi Tingkat kepercayaan
<i>Outcome</i>	Langsung: <i>income</i> , produktivitas Tidak langsung: kesehatan dan kegiatan sosial	Kohesi sosial Ekonomi Lebih mengarah pada modal sosial
Model	Linear	Interaktif/sirkular

Sumber: Schuller (2000).

nya proses interaktif antar komponen masyarakat secara sirkular dapat memperkuat elemen modal sosial yang ada.

Dari sudut konsep, definisi tentang mutu dapat diawali dari identifikasi dan penyelesaian masalah atau akar persoalan yang sebenarnya. Menurut Juran (1995), dalam konteks produk, mutu diartikan sebagai ketepatan untuk dipakai dan tekanan orientasi pada pemenuhan harapan pelanggan. Agak berbeda dengan Juran, Crosby dalam Juran (1995) lebih menekankan pada transformasi budaya mutu. Pendekatannya merupakan proses arus atas-bawah yaitu menekankan kesesuaian individu terhadap perkembangan persyaratan atau tuntutan masyarakat. Sementara itu, Deming yang disitir oleh Juran (1995), lebih menekankan pada kondisi faktual empiris dan cenderung berorientasi pada arus bawah-atas, yaitu mutu dapat dikembangkan jika didukung oleh SDM bermutu.

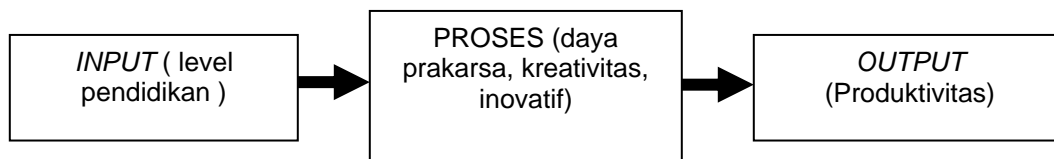
Meski tidak ada satu pun definisi terkait dengan mutu yang diterima secara universal, namun ada unsur kesamaannya, yaitu:

- a. Mutu ditinjau dari sisi proses sebagai upaya memenuhi atau melebihi harapan khalayak. Dalam hal ini termasuk mutu pendamping dalam melayani khalayak.
- b. Mutu tidak saja mencakup aspek proses, hasil pelayanan dan lingkungan, tetapi juga aspek mutu SDM.
- c. Mutu SDM meliputi mutu potensi diri, mutu proses, dan mutu kinerja. Mutu potensi diri antara lain tingkat pengetahuan, etos kerja, sikap, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja, dan kejujuran. Mutu proses dilihat dari komitmen, tingkat kepuasan pendampingan, tingkat keamanan kerja pribadi, dan mutu kehidupan kerja karyawan. Mutu kinerja dilihat dari *output* antara lain berupa kepuasan khalayak dan mutu hasil pendampingan.

- d. Seorang pendamping memiliki mutu tertentu apabila sesuai dengan standar mutu dan kompetensi yang telah ditentukan oleh proyek pendampingan. Dengan kata lain, mutu diartikan sebagai adanya kesesuaian dengan kebutuhan khalayak.
- e. Mutu memiliki karakteristik kondisi yang dinamis sejalan dengan perubahan pasar kerja, teknologi, waktu dan dinamika sosial masyarakat (persepsi), misalnya kebutuhan akan mutu SDM pendamping tentang motivasi, pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kesehatan fisik.

Ciri-ciri mutu SDM pendamping pembangunan pertanian, misalnya dalam proses pengembangan teknik produksi pertanian, dapat dilihat dari berbagai perspektif yakni input, proses dan output. Input mutu SDM yang tersedia (perspektif pertama) sangat menentukan mutu SDM pada kegiatan proses (perspektif kedua); Dua perspektif pertama dan kedua (*input* dan proses) sangat menentukan keberhasilan produktivitas kerja. Berikut disajikan suatu ilustrasi tentang bagaimana tingkat pendidikan dan pengetahuan pendamping tertentu mampu melahirkan daya prakarsa, kreativitas dan inovatif di dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga potensi nyata ini mempengaruhi produktivitas kerjanya (Gambar 3). Dari gambar ini dapat dikatakan bahwa potensi awal pendamping yang masih bersifat potensial (pasif) menjadi unsur riil ketika dimanfaatkan dalam suatu proses pendampingan, dengan dukungan faktor lain. Unsur riil inilah yang merupakan input berikutnya yang mampu menciptakan suatu produktivitas kerja (*ceteris paribus*).

Input, mencakup unsur: a) tingkat pendidikan dan pengetahuan (kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual), b) sikap atas pekerjaan, produktivitas sebagai sistem nilai, etos kerja, persepsi, motivasi, dan sikap akan tantangan, c) tingkat keterampilan



Gambar 3 . Contoh Rangkaian Mutu Input, Proses dan Output (Mangkuprawira dan Hubeis 2007)

manajerial dan operasional, kemampuan berkomunikasi, dan termasuk kepemimpinan, d) daya inisiatif, kreativitas dan keinovatifan, e) kepemimpinan manajerial, teknis-mutu dan kelompok, f) tingkat pengalaman kerja, g) tingkat kedisiplinan, h) tingkat kejujuran, dan i) tingkat kesehatan fisik dan mental kejiwaan.

Proses, mencakup unsur: a) kerja sama secara harmonis sesama rekan pendamping dan manajer pendampingan, b) bekerja dalam sistem yang total, c) perubahan (peningkatan dan pengurangan) motivasi kerja, d) kejadian konflik horisontal dan vertikal, e) frekuensi daya prakarsa, kreativitas dan keinovatifan, f) frekuensi dan ketepatan waktu kehadiran kerja, g) tingkat keselamatan dan keamanan kerja individu, h) tingkat kesehatan kerja, i) tingkat kerusakan mutu produksi, j) tingkat efisiensi kerja, dan k) tingkat komitmen kerja.

Output, mencakup unsur: a) pencapaian standar produktivitas kerja, b) pencapaian standar kinerja organisasi (nilai manfaat), c) pencapaian target penyelesaian kerja, dan d) kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Program untuk Peningkatan Mutu Pendamping Pembangunan Pertanian

Berdasarkan pengalaman lapangan, peran SDM pendamping pembangunan pertanian, khususnya para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat penting karena merupakan pemeran kunci dengan tugas utama mengembangkan kapasitas masyarakat perdesaan dalam mengorganisasi diri, kepemimpinan andal, dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki usaha produktif, khususnya di bidang pertanian untuk kesejahteraan kehidupannya. Pertimbangannya adalah perkembangan kebutuhan khalayak masyarakat perdesaan dan unsur eksternal yang senantiasa berubah. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat perdesaan untuk membangun kepercayaan dirinya terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya dimiliki.

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki pendamping dalam menjalankan tugasnya untuk mendukung proses pembangunan pertanian meliputi (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan

(6) prinsip pembelajaran bersinambung. Sehubungan dengan itu, pada dasarnya pendamping sebagai pihak yang memfasilitasi pengembangan masyarakat perdesaan memiliki beberapa peran dasar yaitu: *pertama*, Analisis Masalah. Pendamping harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis dan mengidentifikasi masalah, serta merumuskan kegiatan baik dilakukan secara sendiri maupun bersama masyarakat yang didampingi.

Kedua, Pembimbing Kelompok. Pendamping melakukan bimbingan dan memberi masukan yang dibutuhkan kelompok, memberikan berbagai masukan dan pertimbangan yang diperlukan oleh kelompok dalam menghadapi masalah. Setiap keputusan diserahkan kepada kelompok sendiri.

Ketiga, Pelatih. Sebagai pendamping, harus menularkan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya kepada khalayak atau kelompok. Maka dari itu, diperlukan pelatihan manajerial, kepemimpinan dan teknis sambil bekerja, dan kalau perlu studi banding ke daerah lain.

Keempat, Inovator. Idealnya pendamping berperan juga sebagai inovator menemukan temuan-temuan sederhana untuk dijadikan sebagai *input* pengembangan masyarakat. Bentuknya antara lain bisa dalam hal inovasi model pembinaan kelompok, metode penyuluhan, dan manajemen administrasi berbasis kearifan lokal.

Kelima, Penghubung. Permasalahan yang dihadapi masyarakat berskala multi-dimensi maka pendamping perlu menjadi penghubung, yaitu membuka akses kepada para pihak terkait instansi lokal dan daerah serta para tokoh masyarakat. Tujuannya agar hambatan pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang terjadi dapat diatasi dengan baik.

Berdasarkan prinsip kerja dan tugas-tugasnya, maka agar supaya pendamping dapat berperan optimum, dibutuhkan pengembangan mutu SDM. Oleh karena itu, model dan tingkat pengembangan SDM pendamping bergantung pada jenis pendampingan, peran pendamping, tingkat pendidikan, dan pengalaman pendamping dalam pendampingan. Namun dalam artikel ini disajikan model yang bersifat umum yang utamanya meliputi: (a)

Pelatihan Dasar Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*; (b) Pelatihan Dasar Pengembangan Masyarakat; (c) Pelatihan kepemimpinan dan manajemen; (d) Pelatihan dasar analisis sosial dan perumusan program; (e) Pelatihan tentang tugas-tugas pendamping sebagai pemfasilitasi; (f) Pelatihan kerja dalam kelompok; (g) Pelatihan tentang peraturan dan kebijakan pembangunan; (h) Pelatihan dasar-dasar teknis produksi dan pemasaran hasil.

Proses pelatihan dilaksanakan dengan model partisipatif, dengan menggunakan model belajar untuk Pendidikan Orang Dewasa (POD). Intinya adalah dengan pendekatan andragogi yaitu sistem belajar umpan balik bagi peserta sehingga mampu menguasai, memahami materi latihan dengan tahapan (1) mengalami; (2) mengungkapkan; (3) menganalisis; (4) menemukan prinsip; dan (5) menerapkan prinsip. Oleh karena itu, dalam proses pelatihan diperlukan sejumlah metode/teknik maupun media seperti curah gagasan, diskusi, simulasi, studi kasus, maupun praktek lapang.

Tahapan pelaksanaan pelatihan partisipatif adalah: (a) Pengorganisasian kelas. Peserta disatukan dalam satu kelas besar yang kemudian selama proses akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil; (b) Penyampaian materi pelatihan sesuai alur dan kurikulum yang sudah dipersiapkan; (c) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang merupakan pembulatan dari keseluruhan materi pelatihan dan layak dapat dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan yang akan pendamping lakukan; dan (d) Evaluasi seluruh proses pelatihan oleh pendamping yang berguna untuk pembelajaran dalam kegiatan pelatihan berikutnya.

Selain dalam bentuk pelatihan, diperlukan cara pengembangan mutu SDM pendamping dengan membentuk forum pendampingan. Pendamping bertugas untuk memfasilitasinya. Tujuan dan lingkup kegiatannya meliputi: (1) pengembangan sinergitas dalam mencari solusi atas permasalahan pendampingan yang bersifat lintas sektoral; (2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan masyarakat, misalnya tentang peningkatan mutu kohesi sosial, produksi dan pemasaran; (3) mengembangkan kemampuan akses kelompok masyarakat terhadap sumber daya produktif dan kemitraan dengan pihak

ketiga; dan (4) meningkatkan kemampuan dan kapasitas pendamping dengan tukar menukar pengalaman dalam pendampingan.

Strategi Pengembangan Masyarakat Perdesaan melalui Pendampingan

Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah pendampingan karena diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Salah satu pendamping dalam proses pembangunan pertanian adalah Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai unsur pekerja sosial di lapangan. Sumodiningrat (2009) menjelaskan bahwa bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu: 1) motivasi, 2) peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, 3) manajemen diri, 4) mobilisasi sumber, dan 5) pembangunan dan pengembangan jaringan.

Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga petani yang miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

Meningkatkan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat perdesaan melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin di perdesaan untuk menciptakan sumber penghidupannya sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahliannya sendiri.

Manajemen Diri

Setiap kelompok harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatannya sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Pada tahap awal, pendamping membantu masyarakat perdesaan untuk mengembangkan sebuah sistem. Selanjutnya memberikan wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

Mobilisasi Sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian, dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat di perdesaan perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya dalam membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin di perdesaan.

Dalam strategi pengembangan masyarakat pertanian di perdesaan melalui pendampingan, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin di perdesaan. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat perdesaan ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan

suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat. Strategi yang digunakan dalam penguatan kapasitas ini adalah melalui pendampingan. Jadi, strategi pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya pendampingan maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan .

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Derajat kesejahteraan rakyat Indonesia dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia membuktikan proses pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat pertanian di perdesaan harus tetap dilaksanakan secara terarah dan bersinambung berbasis kearifan lokal. Unsur terpenting dalam capaian keberhasilan pengembangan masyarakat adalah modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia, dan modal sosial. Unsur modal sosial yang dimaksud di antaranya adalah saling percaya pada sesama anggota masyarakat, empati sosial, kohesi sosial, kepedulian sosial, dan kerja sama kolektif.

Penguatan modal sosial untuk mendukung pembangunan di bidang pertanian meliputi pendidikan agama, sosialisasi keluarga, pemeliharaan dan pengembangan institusi sosial, sosialisasi dan internalisasi pentingnya modal sosial. Disamping itu modal sosial masyarakat perdesaan dapat pula dikuatkan dengan pengembangan komunikasi informasi bidang pertanian, dan mengakomodasi informasi melalui proses penyaringan kemandiriannya.

Dalam prakteknya, pengembangan masyarakat pertanian di perdesaan membu-

tuhkan pendamping yang berfungsi sebagai analisis masalah, pembimbing kelompok, pelatih, inovator, dan penghubung. Salah satu pendamping bagi masyarakat pertanian di perdesaan adalah para penyuluh pertanian lapangan (PPL). Prinsip kerja pengembangan masyarakat pertanian di perdesaan melalui pendampingan adalah (1) kerja kelompok, (2) keberlanjutan, (3) keswadayaan, (4) kesatuan khalayak sasaran, (5) penumbuhan saling percaya, dan (6) prinsip pembelajaran bersinambung. Agar pendamping proses pembangunan pertanian dapat berperan optimum, dibutuhkan pengembangan mutu SDM pertanian melalui pelatihan partisipatif berbasis pendidikan orang dewasa yang terdiri atas metode PRA, pengembangan masyarakat perdesaan, kepemimpinan dan manajemen, analisis sosial dan perumusan program, kerja dalam kelompok, tugas-tugas sebagai pendamping, peraturan dan kebijakan pembangunan, teknis produksi, dan pemasaran hasil pertanian.

Proses pelatihan dilaksanakan menggunakan model partisipatif dengan model belajar untuk POD yang intinya dengan pendekatan andragogi diikuti dengan evaluasi seluruh proses pelatihan oleh pendamping. Selain dalam bentuk pelatihan, diperlukan cara pengembangan mutu SDM pendamping pembangunan pertanian dengan membentuk forum pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, D. 2007. Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat. UGM, Yogyakarta.
- Akdere, M. and Paul B. Robert. 2008. Economics of Social Capital: Implications for Organizational Performance. *Advances in Developing Human Resources* 2008; 10: 802
- Barbier, E.B. and Markandya, A. 1990, "The Conditions for Achieving Environmentally Sustainable Development", *European Economic Review*, Vol. 34 pp.659-69.
- Barker M. 2007. Investments in Religious Capital: An Explorative Case Study of Australian Buddhists. Research Article. *School of Business, James Cook University*
- Bourdieu, P. 1986. "The Forms of Capital", in Richardson, J. (Eds), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of*
- Education, *Greenwood Press, New York, NY*, pp.241-58.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2009. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Februari 2008.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2010. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Februari 2009.
- Coleman, J.S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, Supplement S95-S120.
- Cunningham, I. 2002. Developing Human and Social Capital in Organizations. *Industrial and Commercial Training*.
- Fukuyama, F. 1996. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, Penguin. Harmondsworth.
- Faucheux, S. and M. O'Connor. 1998. Valuation for Sustainable Development: Methods and Policy Indications (Cheltenham, UK: Edward Elgar).
- Finke. R. 2003. Spiritual Capital: Definitions, Applications, and New Frontiers. [terhubung berkala] 25 Oktober 2010. <http://www.spiritualcapitalresearchprogram.com/pdf/finke.pdf>
- Haq, M. 1995. Reflections on Human Development. Oxford University Press, New York.
- Juran, J.M. 1995. Merancang Mutu. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Mangkuprawira, S. dan Hubeis, AV. 2007. Manajemen Mutu SDM. PT Ghalia Indonesia, Jakarta
- Putnam, R., Leonardi, R. and Nanetti, R. 1993. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
- Putnam, Robert D. 2006. E Pluribus Unim: Diversity and Community in the Twenty-First Century, Nordic Political Science Association
- Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect* no. 13. [terhubung berkala] 25 Oktober 2009. <http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/assoc/13putn.html>
- Pyatt, G. and J.I. Round. 1977. Social Accounting Matrices for Development Planning. *Review of Income and Wealth*, Vol. 23, No. 4, pp. 339-364.
- Schuller, T. 2000. Social and Human Capital: The Search for Appropriate Techno methodology', *Policy Studies*.

Sumodiningrat, G. 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Thomas, C. 2000, Global Governance, Development and Human Security: The Challenge of Poverty and Inequality, Pluto Press, London.

UNDP [United Nations Development Programme]. 2007, Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Divided World, New York: Palgrave Mcmillan.

UNDP [United Nations Development Programme]. 2009, Human Development Report 2009 - HDI rankings.